

PENANAMAN MODAL ASING DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DI SEKTOR INDUSTRI

Vanda Ningrum*

Abstract

Investment is important factor related to creating job opportunities. This study analyses the trend of Foreign Direct Investment (FDI) and it's role to absorbed labour force. Explanatory method used in order to explain the characteristics of the industry and the panel regression to calculate the elasticity of labor absorption to FDI. The data is collected from the Indonesian Investment Coordinating Board (BKPM) in period of 2002 to 2007. The data shows the several findings. First, the chemical and pharmaceutical industry gets the highest value of the total FDI, which is 26.88 percent of total FDI, but gives a small contribution to the labor absorption. Second, the textile industry is the most labour absorbing even though it has lower value of total FDI. Third, the leather and textile industry are the most efficient industries. The Last, the pool least square regression shows that U.S. \$ 370 investment is required to absorb one labor.

Keywords: Foreign direct investment (FDI), labor absorption, industry.

Investasi merupakan salah satu faktor penting berkaitan dengan penciptaan kesempatan kerja. Studi ini bertujuan mengkaji perkembangan penanaman modal asing dan perannya dalam menyerap tenaga kerja. Metode eksplorasi digunakan untuk menjelaskan karakteristik industri dan regresi panel untuk menghitung elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap Penanaman Modal Asing (PMA). Data diperoleh dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) periode 2002 hingga 2007. Dari data tersebut didapatkan beberapa temuan. Pertama, industri kimia dan farmasi adalah industri yang memiliki nilai paling besar terhadap total PMA, yakni 26,88 persen dari total PMA, namun memberikan sedikit kontribusi dalam penyerapan tenaga kerja. Kedua, industri tekstil adalah industri yang paling besar menyerap tenaga kerja walaupun memiliki nilai investasi kecil terhadap total PMA, sehingga industri tersebut termasuk dalam kategori industri yang paling efisien. Terakhir, analisa *pool least square regression* memperlihatkan bahwa dibutuhkan investasi sebesar US\$ 370 PMA untuk menyerap setiap satu tenaga kerja.

Kata Kunci: Penanaman modal asing (PMA), penyerapan tenaga kerja, industri.

* Peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PPK-LIPI). E-mail: vanda.ningrum@lipi.go.id

1. LATAR BELAKANG

Pengangguran merupakan masalah terbesar bagi suatu negara, karena pengangguran menyebabkan pendapatan dan produktivitas masyarakat rendah yang pada akhirnya akan menimbulkan kemiskinan dan masalah sosial lain. Negara berkembang seringkali dihadapkan pada besarnya angka pengangguran karena sempitnya lapangan pekerjaan dan besarnya jumlah penduduk usia kerja. Sempitnya lapangan pekerjaan dikarenakan faktor kelangkaan modal untuk berinvestasi, banyaknya angkatan kerja, dan masalah sosial politik di negara tersebut. Sedangkan bagi negara maju masalah pengangguran berkaitan dengan pasang surutnya siklus bisnis (Limongan, 2001).

Berdasarkan data BPS, sejak tahun 1997 angka pengangguran di Indonesia terus mengalami peningkatan hingga tahun 2007, yakni dari 4,7 menjadi 9,11% atau 10,54 juta, sementara besarnya penciptaan lapangan kerja hanya 2,41 juta (data Februari 2007). Pada Februari 2008, jumlah pengangguran mengalami sedikit penurunan menjadi 8,46% atau 9,43 juta orang. Jumlah itu akan bertambah 2 hingga 3 juta orang karena penganggur baru yang memasuki dunia kerja setiap tahunnya dan ratusan ribu tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terpaksa kembali ke Indonesia akibat krisis keuangan global.

Penyerapan tenaga kerja yang lebih besar harus ditopang oleh pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Hasil studi menyebutkan bahwa satu persen pertumbuhan ekonomi dapat menyerap hampir 400 ribu tenaga kerja pada tahun 1994 (Triawati, N., 2005 dalam Iskandar, 2007). Namun elastisitas penyerapan tenaga kerja ini terus menurun, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih banyak ditopang oleh faktor konsumsi (mencapai 75%) dan sisanya berasal dari ekspor dan investasi. Berdasarkan survei dan analisis yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi UI, saat ini setiap satu persen pertumbuhan ekonomi hanya mampu menyerap 200 hingga 250 ribu tenaga kerja (Aryanto dkk. 2008). Dengan demikian, faktor penting untuk mengurangi tingkat pengangguran adalah investasi, karena kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan elastisitas penyerapan tenaga kerja. Walaupun setelah krisis ekonomi 1998, ekonomi Indonesia sudah kembali menunjukkan pertumbuhan yang positif, namun hingga saat ini rata-rata pertumbuhan per tahun relatif masih lambat dibandingkan rata-rata pertumbuhan sebelum krisis tahun 1997, khususnya pada periode pertengahan tahun 1990. Salah satu penyebabnya adalah masih belum intensifnya kegiatan investasi, termasuk penanaman modal asing (PMA).

Menurut UU No.1 tahun 1967, PMA adalah penanaman alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari devisa Indonesia atau alat-alat untuk perusahaan yang dimasukkan dari luar ke dalam negeri yang tidak dibiayai oleh devisa Indonesia. PMA menjadi penting bagi Indonesia dalam mendorong kinerja laju pertumbuhan ekonomi Indonesia; mendorong timbulnya industri pasokan bahan baku lokal; proses alih teknologi dan manajemen; perkembangan kolaborasi yang saling

menguntungkan antara investor asing dan lokal; meningkatkan kegiatan usaha yang beorientasi ekspor; peningkatan sumber-sumber pajak untuk pembangunan pusat dan lokal dalam meningkatkan penyelenggaraan fasilitas umum dan sosial; serta konsumsi lokal terhadap kebutuhan pokok (Chandra, 2006).

Berbagai faktor yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan investasi di Indonesia adalah faktor ekonomi dan nonekonomi. Faktor ekonomi yang sangat berpengaruh pada investasi adalah tingkat suku bunga, kebijakan perpajakan, regulasi perbankan, dan infrastruktur dasar. Sedangkan faktor nonekonomi adalah kestabilan politik, penegakan hukum, masalah pertanahan untuk lahan usaha, tingkat kriminalitas dalam masyarakat, demonstrasi perburuhan dan mahasiswa, komitmen pemerintah, komitmen perbankan, infrastruktur dan layanan birokrasi pemerintah daerah khususnya perijinan usaha¹.

Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan kebijakan pemerintah dalam penciptaan iklim yang kondusif untuk meningkatkan kegiatan investasi. Selain itu diperlukan strategi penciptaan investasi pada sektor industri yang bersifat padat karya untuk mengurangi tingkat pengangguran yang semakin tinggi. Untuk itu sektor industri yang mampu menyerap tenaga kerja menjadi sangat penting dalam hal membantu peningkatan lapangan kerja.

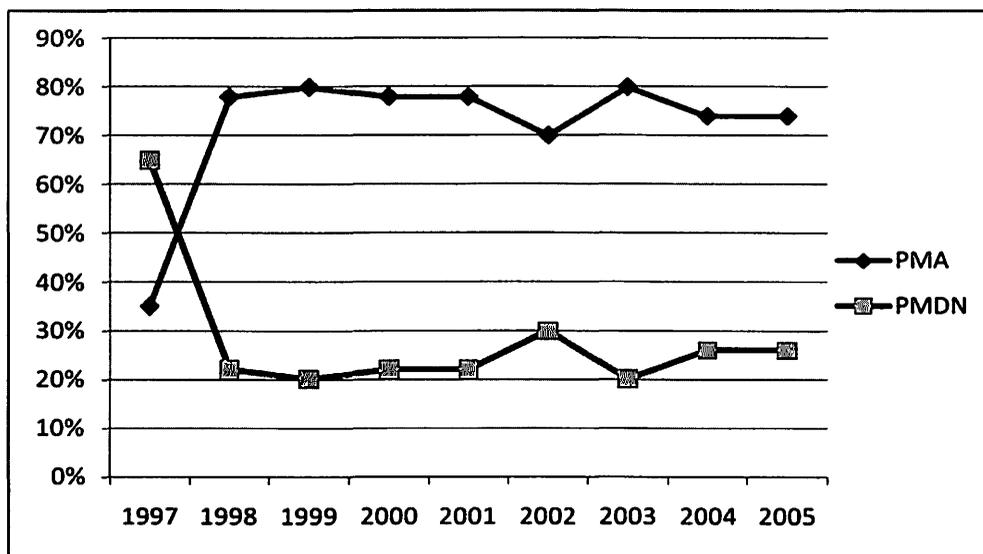
Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan penanaman modal asing pada sektor industri di Indonesia dan besarnya penyerapan tenaga kerja, sehingga dapat diketahui sektor mana yang memberikan manfaat ekonomi terbesar khususnya dalam penciptaan lapangan kerja. Kajian ini diharapkan mampu memberikan masukan bagi penentu kebijakan, sehingga dapat meningkatkan minat para investor asing untuk membuka usaha baru di Indonesia.

Kajian ini menggunakan metode eksplorasi untuk melihat karakteristik jenis industri dan menggunakan regresi panel untuk menghitung elastisitas penyerapan tenaga kerja terhadap PMA. Analisis ini menggunakan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tahun 2002 sampai 2007 tentang besaran PMA dan penyerapan tenaga kerja yang telah disetujui BKPM. Data ini meliputi seluruh jenis industri selain investasi sektor minyak dan gas bumi, perbankan, lembaga keuangan nonbank, asuransi, sewa guna usaha, pertambangan dalam rangka kontrak karya, perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara, investasi yang perizinannya dikeluarkan oleh instansi teknis/ sektor, investasi porto folio (pasar modal) dan investasi rumah tangga dan *leasing*. Sedangkan data tenaga kerja yang terserap dalam kajian ini adalah jumlah tenaga kerja baik yang telah terserap maupun direncanakan akan terserap pada jenis industri tertentu akibat adanya investasi.

¹ Berdasarkan hasil kajian ekonomi regional Bank Indonesia tahun 2007.

2. PERKEMBANGAN INVESTASI SEKTOR INDUSTRI DI INDONESIA

Sebelum krisis moneter pada tahun 1998, penanaman modal asing (PMA) masih relatif kecil dibandingkan penanaman modal yang berasal dari dalam negeri (PMDN), yaitu 30% berasal dari PMA dan 70% sisanya berasal dari PMDN. Sebaliknya sesudah krisis, kontribusi investasi PMA lebih tinggi dibandingkan PMDN, yaitu 70% dari total investasi PMA dan sisanya dari PMDN (Grafik 1). Kondisi ini terlihat dari nilai investasi PMA pada tahun 1997 sebesar Rp 10.105.484.540.000 (dikonversikan berdasarkan rata-rata nilai tukar rupiah per dolar yang berlaku) dan pada tahun 1998 menjadi Rp 50.226.541.330.000. Sedangkan nilai investasi PMDN tahun 1997 sebesar Rp18.628.824.570.000 kemudian turun di tahun 1998 menjadi Rp14.858.949.260.000. Terjadinya perubahan perbandingan PMA dan PMDN ini lebih disebabkan oleh adanya depresiasi rupiah terhadap dolar dari Rp 2.909,3 per dolar tahun 1997 menjadi Rp 10.013,6 per dolar sehingga nilai PMA yang dirupiahkan menjadi lebih besar.



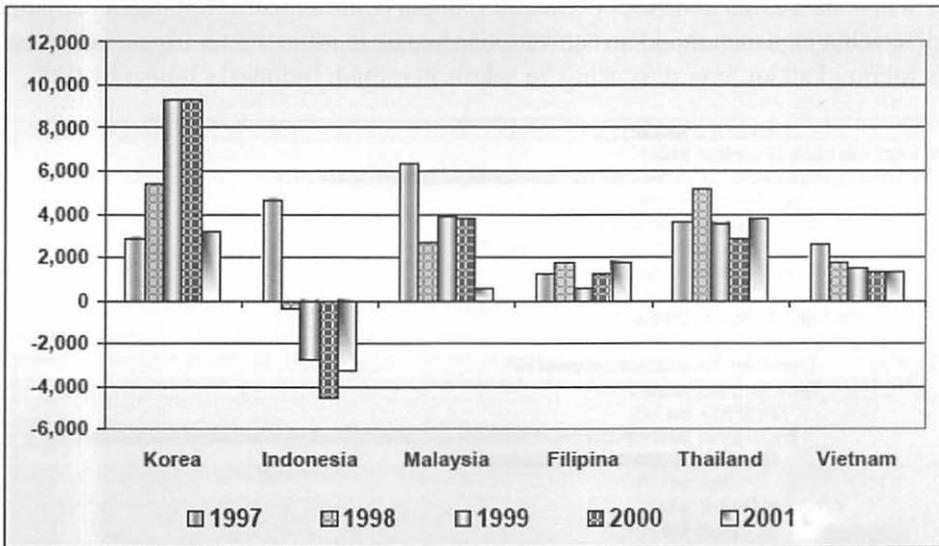
Sumber: BKPM 1997–2005, Subroto (2007).

Grafik 1. Persentase penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Indonesia

Jika dilihat dari besarnya nilai PMA, terjadi penurunan nilai nominal investasi asing akibat krisis moneter. Pada tahun 1997 nilai persetujuan PMA mencapai titik tertinggi yaitu sebesar US\$ 33.663.682 (dalam ribuan) bahkan realisasi investasi asing ini melebihi realisasi investasi di Cina (Subroto, 2007). Negara investor tertinggi adalah Inggris yang menyumbang sebesar 16,18% dari total investasi di Indonesia, kemudian disusul oleh Jepang dan Jerman masing-masing 16,02% dan 13,20%. Pada puncak

krisis tahun 1998 nilai nominal PMA turun drastis ke level US\$ 13.635.791 (dalam ribuan) dan pada tahun 2006 mulai menunjukkan perbaikan investasi menjadi US\$ 15.645.782,35 (dalam ribuan). Nilai investasi pada tahun 2008 tersebut disumbang oleh meningkatnya sektor industri komunikasi terutama di luar Jawa, sebagai akibat perubahan kurs dolar yang meningkatkan pendapatan masyarakat dari komoditas ekspor.

Dibandingkan dengan negara Asia lainnya, Indonesia sejak tahun 1998 hingga 2001 terus mengalami arus netto investasi asing yang negatif, sedangkan negara lainnya sudah menunjukkan arus netto positif (Grafik 2). Hal ini mengindikasikan daya tarik investasi Indonesia di Asia menurun. Pasang surut nilai investasi ini sangat ditentukan oleh berbagai faktor seperti krisis keuangan dunia, stabilitas nilai rupiah, kestabilan politik, dan kepastian hukum, serta kondisi sosial budaya di Indonesia.



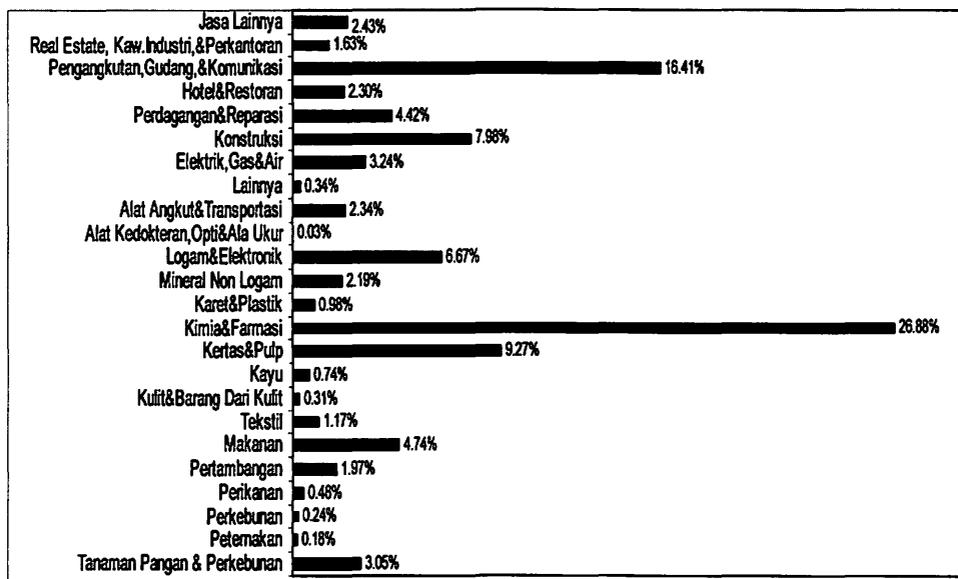
Sumber: World Investment Report 2002, UNCTAD. Purwanto (2004)

Grafik 2. Perkembangan aliran penanaman modal asing di beberapa negara kawasan Asia (dalam juta US\$)

Menurut *International Financial Corporation/IFC*- Bank Dunia, pada tahun 2007 Indonesia menempati posisi 135 dari 175 negara dalam hal kemudahan berusaha. Sedangkan Singapura berada pada peringkat pertama, Thailand ke 18, Malaysia ke 25, Cina ke 93 dan Vietnam ke 104. Walaupun waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha di Indonesia menurun dari 151 hari menjadi 97 hari, namun masih lebih lama dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Waktu yang dibutuhkan untuk memulai usaha di Singapura adalah 6 hari, Thailand 33 hari, Malaysia 30 hari, Cina 35 hari dan Vietnam 50 hari (Bappenas, 2007).

Dilihat dari peringkat daya saing ekonomi menurut *World Economic Forum (WEF)*, pada tahun 2003 Indonesia menempati urutan ke 67 dan menurun ke peringkat 69, dan pada tahun 2006 meningkat ke peringkat 50 dari 80 negara. Peringkat ini masih di bawah negara-negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam.

Selama tahun 2002–2007, investasi PMA mencapai 104.173.540 (000 US\$) yang meliputi 24 sektor. Industri yang memberikan kontribusi terbesar terhadap total PMA adalah industri kimia dasar dan farmasi yaitu 26,88% dari total investasi, disusul oleh industri lainnya seperti pengangkutan, gudang dan komunikasi, kertas dan pulp, serta konstruksi. Sementara investasi asing ke sektor pertanian relatif kecil karena keterbatasan infrastruktur jalan dan irigasi. Studi yang dilakukan Irawan (2005) menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu persen infrastruktur jalan akan meningkatkan 1,33% investasi asing ke sektor pertanian (jangka pendek) dan 7% (jangka panjang). Studi tersebut juga menunjukkan bahwa setiap kenaikan infrastruktur irigasi satu persen akan meningkatkan investasi asing ke sektor pertanian Indonesia sebesar 1,98%.



Sumber : BKPM 2002 – 2007, Diolah.

Grafik 3. Persentase penanaman modal asing per sektor industri periode th. 2002—2007

Tingginya minat investor asing untuk menanamkan modalnya pada industri kimia dan farmasi disebabkan oleh berbagai faktor. Rismana (2003) mengemukakan salah satu sumber daya alam non-hayati yang berpotensi besar adalah lautan Indonesia yang luas. Unsur utama dari air laut bisa digunakan untuk pengembangan produksi dari industri tersebut. Selain itu, rencana penggunaan biodiesel yang telah dicanangkan

oleh pemerintah juga memberikan angin segar bagi industri kimia untuk mengembangkan usahanya. Perkembangan industri kimia telah dimulai sejak tahun 1995 dengan meningkatnya kegiatan pemasaran global, hasil industri kimia mencapai 9,7% per tahun dengan kenaikan harga pada tingkat sedang.

Krisis moneter yang melanda hampir seluruh negara, pada dasarnya menurunkan nilai investasi pada industri kimia dan farmasi, dikarenakan risiko yang terlalu besar. Setelah krisis, industri kimia bangkit lagi dan meningkatkan kesempatan pada negara yang memiliki *distinctive resources* atau dekat dengan sumber daya alam dan *capabilities advantage*, yaitu adanya kapasitas yang mendukung seperti pasar domestik yang luas dan jumlah tenaga kerja yang banyak seperti Indonesia.

Dilihat dari besarnya pasar (*market share*) Indonesia, terjadi peningkatan pasar yang signifikan khususnya pasar farmasi, yaitu meningkatnya penjualan dari US\$ 483 juta menjadi US\$ 2 miliar selama tahun 1980–2004 (Sampurno, 2007). Meskipun demikian, hingga kini masih ada dua masalah utama dalam industri kimia, yaitu infrastruktur dan ketersediaan gas (Subroto, 2007). Indonesia masih belum mempunyai fasilitas pergudangan khusus untuk hasil industri yang sifatnya likuid (*liquid handling port*). Dengan dibukanya ASEAN *Free Trade Area* (kawasan perdagangan bebas ASEAN), Indonesia dianggap masih kalah menarik dibandingkan dengan Malaysia, terutama dari segi infrastruktur. Kendala lain adalah masalah ketersediaan gas yang masih terbatas, sehingga belum mampu memenuhi permintaan gas sesuai dengan kebutuhan.

Selain permasalahan infrastruktur di atas, krisis global pada tahun 2008 ini berdampak pada meningkatnya biaya produksi pada industri kimia, khususnya biaya bahan baku yang sebagian besar diperoleh dari import, termasuk untuk pertanian (Raharja dkk. 2008). Ketidakstabilan nilai rupiah menyebabkan biaya produksi untuk memperoleh bahan baku menjadi lebih mahal.

Industri kedua yang menjadi sasaran investasi asing adalah pengangkutan, gudang dan komunikasi yang mencapai nilai investasi sebesar 16,41%. Hal ini disebabkan karena kebutuhan produk dari industri ini belum dioptimalkan oleh para pengusaha dalam negeri. Sebagai contoh, dalam industri pelayaran 95% jasa pelayaran ekspor impor dilayani oleh kapal-kapal asing, begitu juga jasa pelayaran domestik 50% dilayani kapal-kapal asing (Santoso, 2005). Peluang pasar tersebut tentunya menarik investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia. Sampai tahun 2002 pemerintah telah melakukan divestasi pada perusahaan-perusahaan komunikasi, sehingga pada periode tersebut terjadi kenaikan modal asing yang signifikan. Kebijakan ini didukung oleh dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1994 tentang Kepemilikan Saham Dalam Perusahaan yang Didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing. Dalam PP tersebut kepemilikan saham asing bisa mencapai 95%.

Industri ketiga yang menjadi sasaran asing adalah industri kertas dan percetakan, dengan nilai investasi asing mencapai 9,27%. Faktor yang menyebabkan daya tarik investor untuk mengembangkan sektor ini di Indonesia adalah tersedianya lahan untuk penanaman kayu sebagai bahan baku industri kertas. Pemerintah juga mendukung

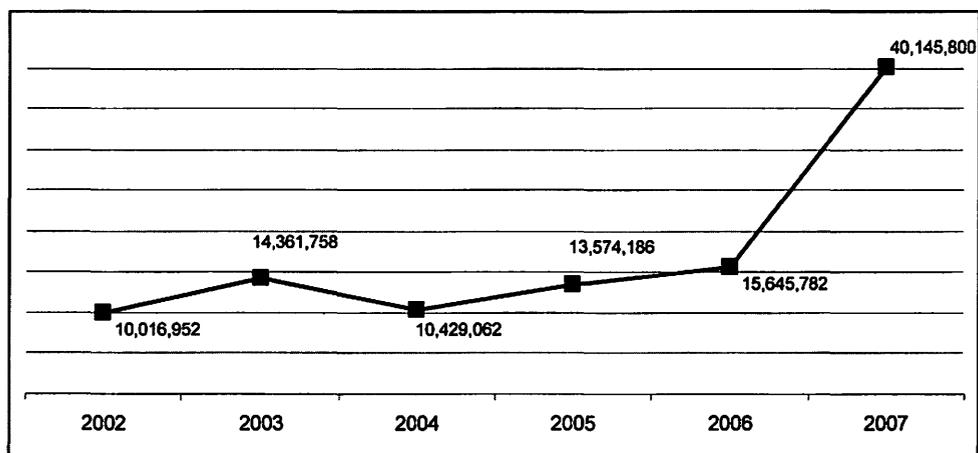
majunya industri ini dengan pembangunan hutan tanaman industri (HTI) khususnya bubur kertas (*pulp*). Faktor pendukung lainnya adalah harga *pulp* yang tinggi di pasar internasional dan konsumsi kertas yang terus meningkat. Meskipun harga *pulp* dan kertas di pasar internasional berfluktuasi dari waktu ke waktu, produsen *pulp* dan kertas di Indonesia sulit untuk merugi, karena biaya produksi *pulp* di Indonesia hanya US\$ 217 per ton (sebelum krisis ekonomi). Biaya tersebut jauh lebih rendah dibandingkan biaya pembuatan *pulp* di kawasan Asia/Pasifik, Amerika Latin, Amerika Utara, Eropa Barat dan Jepang, yaitu masing-masing US\$ 250, 260, 300, 420, dan 590. Brazil dan Chile merupakan saingan kuat Indonesia, dengan biaya produksi *pulp* per ton masing-masing US\$ 231 dan 241 (Manurung, 2000). Namun, perubahan iklim yang terjadi di dunia adalah tantangan terbesar untuk industri ini, program pelestarian hutan di Indonesia secara langsung mengurangi ketersediaan lahan untuk pembangunan bahan baku industri kertas.

Industri yang paling sedikit menarik minat investor asing adalah alat kedokteran, optik, dan alat ukur dengan investasi hanya 0,03% (Grafik 2). Perlambatan sektor ini diduga karena kurangnya pasar dalam negeri dan biaya untuk membangun industri tersebut di Indonesia yang relatif lebih mahal dibandingkan dengan negara yang sudah maju teknologinya.

Secara umum, industri terbesar dalam PMA termasuk dalam sektor industri manufaktur dan jasa, sedangkan sektor pertanian seperti industri pangan dan perkebunan, perikanan, dan kehutanan merupakan industri yang relatif kecil dalam menyerap investasi asing. Kebanyakan investasi untuk industri primer tersebut berasal dari investor lokal.

Untuk meningkatkan masuknya investasi asing, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan antara lain: 1) Undang-Undang No 13 Tahun 2005. Sebagai dampak dari undang-undang tersebut, investasi asing yang disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan kecenderungan meningkat dibandingkan investasi asing sebelumnya. (Grafik 4). 2) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi dengan tujuan untuk meningkatkan investasi. Setelah dikeluarkannya peraturan tersebut, *trend* investasi asing memiliki kecenderungan naik, bahkan pada tahun 2007 kenaikan investasi asing menjadi US\$ 40.145,8 (dalam ribuan), sedangkan pada tahun sebelumnya hanya sebesar US\$ 15.645,782 (dalam ribuan). 3) Undang - Undang Penanaman Modal No. 25 tahun 2007 yang mencakup aspek pelayanan koordinasi, fasilitas, hak dan kewajiban investor, ketenagakerjaan, dan sektor-sektor yang diizinkan untuk investor asing. Namun kenyataannya, para investor masih menghadapi kendala dari sisi perizinan. Dikeluarkannya UU tersebut belum menjadi satu paket dengan peraturan perundangan lain terkait perizinan dan lain lain. Berbagai peraturan seperti Peraturan Perdagangan, UU No. 40/2007 mengenai Perseroan Terbatas, UU No. 39/2007 tentang Cukai, UU No. 17/2006 tentang Kepabeanan, UU No. 2/2005 mengenai Penyelesaian Hubungan Industrial, UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 22/2001 tentang Investasi di Sektor Migas, secara langsung dan tidak langsung berpengaruh terhadap kegiatan

usaha di Indonesia sehingga efektifitas UU Penanaman Modal tersebut masih relatif rendah.



Grafik 4. Pergerakan Total Penanaman Modal Asing Tahun 2002 – 2007 (dalam ribuan US\$)

Sumber: BKPM 2002 – 2007, Diolah

3. INVESTASI DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA

Nilai ekonomi suatu investasi selain dilihat dari penambahan *output*, juga harus dilihat dari jumlah tenaga kerja yang mampu diserap, karena program investasi bukan hanya dimaksudkan untuk pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran. Berbagai studi telah dilakukan untuk melihat dampak Investasi pada penyerapan tenaga kerja antara lain Greenaway, Morgan dan Wright (2002) yang menunjukkan adanya dampak positif investasi asing di negara berkembang, antara lain pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Selain itu, investasi langsung dari modal asing membuka lapangan kerja baru bagi para penganggur di negara-negara berkembang. Penelitian lain dari Ramsletter (2004), selama tahun 1996 hingga 2000, menunjukkan adanya pola ketertarikan para pencari kerja yang berpendidikan tinggi di Thailand untuk bekerja di perusahaan asing, karena standar upah yang lebih tinggi. Fenomena menarik yang disampaikan oleh Falk dan Koebel (2004) menyatakan bahwa dalam industri manufaktur, penggunaan teknologi komputerisasi ternyata tidak memberikan efek substitusi yang kuat terhadap penggunaan pekerja terdidik. Namun, pada industri jasa, penggunaan komputerisasi memiliki efek substitusi terhadap penggunaan tenaga kerja terdidik (Syamsudin dkk, 2008).

Di Indonesia, sebagian besar industri yang menjadi sasaran investor asing selama periode 2002 hingga 2007 adalah industri manufaktur dengan penggunaan komputerisasi. Jika dikaitkan dengan kondisi angkatan kerja Indonesia yang mayoritas berpendidikan rendah, maka investasi pada industri tersebut kurang memberikan efek positif pada

kondisi tenaga kerja Indonesia. Data statistik menunjukkan bahwa sekitar 60% pekerja berpendidikan SMP atau kurang, dan selebihnya (sekitar 40%) adalah pekerja yang berpendidikan SMP ke atas (Wartaman, 2007),

Elastisitas besarnya tenaga kerja yang terserap oleh PMA di Indonesia selama tahun 2002 hingga 2007 menunjukkan angka 0,37 yang berarti setiap penyerapan satu tenaga kerja diperlukan rata-rata US\$ 370 dari PMA (Tabel 1).

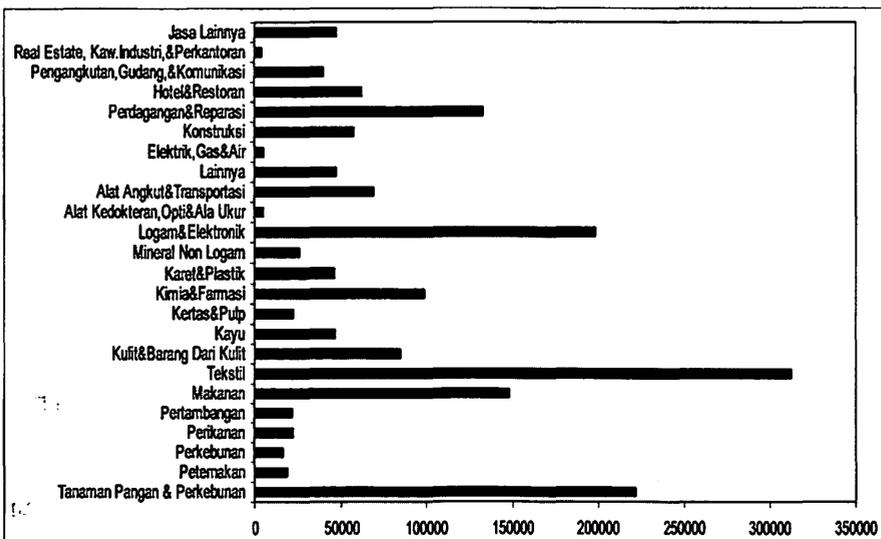
Tabel 1. Hasil Regresi Tenaga Kerja Terserap terhadap Nilai Penanaman Modal Asing (PMA) Disetujui Tahun 2002—2003.

Variabel	Koefisien	Standar Error	Probabilitas
Dependen: Tenaga Kerja Terserap	0.37	0.50	0.00
Independen: Nilai PMA			

Pool least square dengan adjusted R square sebesar 79%.

Sumber: Hasil olahan data

Hasil regresi di atas merupakan hasil nilai keseluruhan sektor investasi, yang pada kenyataannya menunjukkan perbedaan karakteristik dari masing-masing sektor industri dalam menyerap tenaga kerja. Perbedaan ini ditentukan oleh teknologi padat modal yang diterapkan di masing-masing sektor industri. Berikut disajikan jumlah tenaga kerja yang terserap dari PMA selama 2002 sampai 2007.



Sumber: BKPM 2002 - 2007, Diolah

Grafik 5. Tenaga kerja terserap per sektor industri dari PMA disetujui periode 2002—2007.

Grafik tersebut menunjukkan bahwa selama periode tersebut, industri yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah industri tekstil (311.774 orang), kemudian diikuti industri tanaman pangan dan perkebunan (221.178 orang), industri logam mesin dan elektronik (198.172), industri makanan (148.056), dan industri perdagangan dan reparasi (132.551). Sementara industri kimia dan farmasi yang merupakan industri terbesar dalam kontribusi investasi asing, hanya mampu menyerap 98.622 tenaga kerja dan industri yang paling sedikit menyerap tenaga kerja yaitu konstruksi (4.152). Angka-angka penyerapan tenaga kerja tersebut memperlihatkan bahwa industri manufaktur yang tergolong industri sekunder mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak di bandingkan sektor industri primer (pertanian) maupun tersier dalam periode waktu yang sama.

Dilihat dari jumlah investasi asing yang ditanamkan, industri tekstil mempunyai nilai investasi yang relatif kecil yaitu hanya 1,17% dari total investasi, dan kebanyakan investor berasal dari India, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. Walau demikian industri tekstil merupakan industri padat karya, yang banyak menyerap tenaga kerja dan mampu memberi upah yang kompetitif, sehingga industri ini seharusnya dapat berkembang pesat di Indonesia. Dari sisi pendidikan, industri ini tidak membutuhkan tenaga kerja dengan tingkat pendidikan yang tinggi, namun diperlukan tenaga dengan keterampilan khusus yang relatif mudah untuk dipelajari dibandingkan dengan berbagai jenis industri lainnya.

Secara konseptual, pertumbuhan atau kinerja ekspor tekstil Indonesia ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor permintaan dan faktor penawaran. Dari sisi permintaan, pertumbuhan ekspor dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dunia. Dari sisi penawaran, kinerja ekspor sangat dipengaruhi oleh daya kompetisi (Basri, 2006). Dari sisi permintaan, permasalahan yang dihadapi antara lain berkurangnya pangsa pasar untuk negara Asia lainnya karena persaingan dengan Cina yang mampu menguasai 22% pasar dunia, dan negara Asia lainnya hanya mampu menguasai 6% (Diao dan Somwaru, 2001). Kendala lainnya adalah masuknya impor tekstil ilegal yang mampu menguasai 50% pasar dalam negeri, serta menurunnya pertumbuhan ekonomi Amerika akibat krisis global, sehingga mengurangi perkembangan ekspor nonmigas dan manufaktur.

Dari sisi penawaran, permasalahan industri tekstil Indonesia antara lain kondisi mesin yang 80% sudah berumur lebih dari 20 tahun, sehingga menyebabkan produktivitas industri turun sampai 50%, serta mahalnya biaya produksi akibat biaya tenaga kerja/buruh dan energi seperti listrik. Hingga saat ini biaya buruh industri tekstil di Indonesia masih dua kali lebih mahal dibandingkan negara produsen lainnya seperti Bangladesh dan Vietnam. Di Bangladesh dan Vietnam biaya tenaga kerja buruh sebesar US\$ 0,35 per jam, sedangkan di Indonesia US\$ 0,76 per jam (Miranti, 2007). Permasalahan tekstil lainnya yaitu mengenai pemogokan buruh. Dalam penelitian yang dilakukan oleh LPEM-FEUI dalam Basri (2006) terdapat hubungan negatif yang signifikan secara statistik antara jumlah kasus pemogokan dengan pertumbuhan investasi asing dalam

sektor tekstil. Kenaikan frekuensi pemogokan sebesar satu persen akan menurunkan nilai investasi asing yang disetujui di industri tekstil sebesar 0.3%.

Industri tanaman pangan dan perkebunan juga mampu menyerap tenaga kerja sebesar 221.178 orang (12,6%) selama 2002 hingga 2007, dengan jumlah investasi sebesar 3,05% dari total investasi. Seperti halnya pada tekstil, industri ini juga tidak memerlukan tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan yang relatif tinggi dan spesifikasi keterampilan tertentu.

Dengan penggunaan rumus: jumlah PMA per industri dibagi dengan jumlah angkatan kerja terserap, tingkat efisiensi penyerapan tenaga kerja terhadap investasi asing yang diperoleh menunjukkan korelasi positif dengan biaya yang dikeluarkan, yaitu semakin kecil angka yang dihasilkan, semakin murah biaya menyerap tenaga kerja terhadap investasi tersebut (Tabel 2).

Tabel 2. Rata-Rata Tenaga Kerja Terserap per Sektor Industri per US\$ 1000

Jenis Industri	Rata-rata Tenaga Kerja Terserap Per US\$ 1000
Kulit&Barang Dari Kulit	3.8
Tekstil	3.9
Alat Kedokteran,Opti&Ala Ukur	6.5
Lainnya	7.6
Peternakan	10.2
Tanaman Pangan & Perkebunan	14.4
Perkebunan	15.3
Kayu	16.4
Karet&Plastik	21.9
Perikanan	22.1
Makanan	33.4
Perdagangan&Reparasi	34.7
Logam&Elektronik	35.0
Alat Angkut&Transportasi	35.3
Hotel&Restoran	38.7
Jasa Lainnya	53.8
Mineral Non Logam	89.5
Pertambangan	94.2
Konstruksi	144.4
Kimia&Farmasi	284.0
Real Estate, Kaw.Industri, &Perkantoran	409.3
Pengangkutan,Gudang,&Komunikasi	427.3
Kertas&Pulp	431.3
Elektrik, Gas&Air	662.1

Sumber: BKPM, Diolah

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa industri yang memiliki angka efisiensi tinggi antara lain industri kulit, tekstil, dan pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwa untuk menyerap tenaga kerja dibutuhkan nilai investasi yang lebih rendah dibandingkan dengan industri yang memiliki angka efisiensi relatif besar. Tingkat efisiensi tertinggi terjadi pada industri kulit, karena dengan investasi yang dibutuhkan untuk menyerap satu tenaga kerja dibutuhkan US\$ 3,8 (dalam juta) dan untuk industri tekstil dibutuhkan US\$ 3,9 (dalam juta).

Industri kimia dan farmasi yang memiliki kontribusi terbesar terhadap total investasi asing, membutuhkan US\$ 284 (dalam juta) untuk menyerap setiap satu pekerja. Jika dibandingkan dengan industri lainnya, industri ini membutuhkan biaya yang relatif besar dalam menyerap setiap satu tenaga kerja. Hal ini memperlihatkan bahwa pada sektor industri padat modal, biaya yang dibutuhkan untuk menyerap tenaga kerja relatif besar, karena dibutuhkan penambahan kapital untuk peningkatan teknologi.

4. KESIMPULAN

Adanya kecenderungan yang menurun pada nilai PMA setelah tahun 1998 menunjukkan bahwa daya tarik investasi asing di Indonesia terus melemah, hal ini terlihat dari arus investasi asing langsung yang keluar melebihi arus investasi asing langsung yang masuk ke Indonesia. Walaupun secara proporsi, besarnya PMA melebihi PMDN karena adanya depresiasi rupiah.

Selama periode 2002 hingga 2007, industri kimia dan farmasi merupakan industri yang paling memberikan kontribusi terbesar terhadap total investasi asing. Industri ini mampu mencapai 26,88% dari total nilai PMA. Besarnya pasar dalam negeri merupakan faktor penarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Namun permasalahan yang masih dihadapi oleh industri ini adalah kurangnya sarana infrastruktur untuk kelancaran proses produksi dan ketidakstabilan nilai rupiah yang menyebabkan mahalnya biaya bahan baku impor industri tersebut.

Dilihat dari kemampuan menyerap tenaga kerja, terlihat bahwa industri kimia dan farmasi tidak banyak menyerap pekerja dari investasi yang ditambahkan walaupun industri ini paling memberikan kontribusi PMA terbesar. Berdasarkan angka efisiensi untuk menyerap setiap satu satuan tenaga kerja, industri ini termasuk dalam industri yang membutuhkan biaya besar dalam menyerap tenaga kerja. Hal ini disebabkan karena sifat industri yang merupakan *capital intensive* sehingga mampu menambah *capital inflow* Indonesia, namun kurang mampu untuk mengurangi angka pengangguran.

Industri yang mampu menyerap banyak tenaga kerja adalah industri tekstil. Industri ini mampu menyerap 26,88% tenaga kerja terserap selama 2002 hingga 2007. Secara keseluruhan, dibutuhkan US\$ 370 PMA untuk menyerap setiap satu tenaga kerja. Hingga saat ini industri tekstil masih dihadapkan pada permasalahan besar seperti produktivitas mesin industri yang rendah, impor ilegal, dan mahalnya biaya energi seperti

listrik dan buruh. Dari sisi upah tenaga kerja, Indonesia pada dasarnya belum mampu bersaing dengan produsen tekstil negara lain seperti Bangladesh, Vietnam, dan India yang mampu memberi upah jauh lebih murah dibandingkan Indonesia. Industri tekstil adalah industri strategis yang mampu menyerap tenaga kerja di Indonesia karena sifatnya yang padat karya.

Industri yang paling efisien dalam menyerap tenaga kerja per jumlah investasi terjadi pada industri barang dari kulit dan sepatu. Untuk setiap penyerapan satu orang tenaga kerja yang diserap dibutuhkan US\$ 3,8 juta penambahan investasi. Sektor lainnya yang juga efisien adalah industri tekstil. Sedangkan industri yang paling banyak membutuhkan penambahan investasi dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap adalah industri listrik, gas, dan penyedia air.

Keberadaan investor asing di Indonesia lebih berkontribusi dalam meningkatkan industri padat modal dibandingkan dengan industri padat karya. Tujuan pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran masih sulit terwujud jika peningkatan industri padat modal hanya mampu menyerap sedikit tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan dan keterampilan tinggi. Padahal kondisi angkatan kerja Indonesia masih didominasi oleh pekerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan yang kurang kompetitif. Bahkan berdasarkan angka efisiensi dibutuhkan penanaman modal yang relatif tinggi untuk melakukan penyerapan tenaga kerja pada industri yang menjadi sasaran investor asing. Kondisi ini diperparah dengan menurunnya daya saing Indonesia dalam menarik investor asing.

Upaya yang diperlukan untuk menghadapi kondisi tersebut adalah peningkatan peran pemerintah dalam menciptakan iklim investasi, antara lain melalui peningkatan sarana infrastruktur dan menjadikan peraturan tentang penanaman modal dalam satu paket terpadu dengan peraturan lainnya terkait kegiatan usaha di Indonesia. Selain itu, pemerintah juga dapat memastikan bahwa pendampingan tenaga kerja lokal untuk asing menitikberatkan pada alih teknologi dan keahlian sehingga secara bertahap dapat meningkatkan keahlian yang dibutuhkan sesuai dengan pengembangan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryanto, Y. Parlindungan, J. Roida, L. 2008. "RAPBN Bukan Segalanya." (www.majalahtrust.com/danlainlain/politik/690.php, diakses 19 Desember 2008).
- Bank Indonesia. 2007. "Survey Faktor-Faktor Non Ekonomi yang Mempengaruhi Iklim Investasi di Sulsel". *Kajian Ekonomi Regional Sulawesi Selatan*, Triwulan II.
- Bappenas. 2006. "Peningkatan Investasi dan Sektor Non Migas". (www.bappenas.go.id, diakses 20 Desember 2008).
- BPS. 2008. *Survey Tenaga Kerja Nasional 2007*. Jakarta: BPS.
- Basri, Chatib. 2006. "Tekanan Pada Industri Tekstil." (<http://www.freelists.org>, diakses 21 Desember 2008).

- “Elastisitas Tenaga Kerja Memburuk”. *Bisnis Indonesia*, 4 Juli 2005.
- Chandra, Aditiawan. 2006. “Peran Penanaman Modal Dalam Pembangunan Nasional”. *Media Indonesia*, 30 November 2006.
- Irawan, Andi. 2005. “Membernaskan Strategi Revitalisasi Pertanian.” (www.iei.or.id/publicationfiles/Revitalisasi%20Pertanian.pdf, diakses 20 Desember 2008).
- Iskandar, Arif. 2997. “Pertumbuhan Ekonomi Tinggi dan Mitos Penyerapan Tenaga Kerja”. (<http://beritasore.com>, diakses 20 Desember 2008).
- Limongan, Andreas. 2001. “Masalah Pengangguran di Indonesia.” <http://www.library.ohiou.edu>, diakses 20 Desember 2008).
- Manurung, Togu. dan Sukaria, Hendrikus. 2000. *Industri Pulp dan Kertas: Ancaman Baru Terhadap Hutan Alam Indonesia.* (www.pulp-dan-kertas-indonesia.blogspot.com, diakses 13 Agustus 2008).
- Miranti, Ermina. 2007. “Mencermati Industri Tekstil Indonesia: Antara Potensi dan Peluang.” *Economic Review*, (209), Oktober 2008).
- Purwanto, Deniey Adi. 2004. “Sudahkan Perekonomian Indonesia Keluar Dari Krisis.” (www.Indef.Or.id, diakses 20 Desember 2008).
- Raharja, M. dan Haraito, G. 2008. “Bila Bea Masuk Dihapus, Seharusnya Lebih Murah.” *Kontan*, Minggu IV, November 2008. (www.dannydarussalam.Com).
- Rismania, Eriawan. 2003. “Brine Sumber Bahan Baku Kimia Potensial yang Belum Tergarap.” (www.kompas.com, diakses 13 Agustus 2008).
- Sampurno, DR. 2007. “Membangun Daya Saing Farmasi Indonesia Menghadapi Harmonisasi Regulasi Farmasi ASEAN”. (www.strategic-manage.com, diakses 13 Agustus 2008).
- Santoso, Ferry. 2005. “Inpres Pemberdayaan Industri Pelayaran, Mengikis Dominasi Kapal Asing dan Membangun Citra Armada Nasional.” (www2.kompas.com, diakses 14 Agustus 2008).
- Subroto, Athor. 2007. *Hasil Kajian 10 Sektor Sasaran Investasi di Indonesia*. Laporan Penelitian. Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jakarta: BKPM.
- Syamsudin dan Setawan, A. 2008. “FDI, Kebijakan Industri Dan Masalah Pengangguran Studi Empirik di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan UMS*, 9 (1) Juni.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007. Tentang Penanaman Modal. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727.
- Wartaman, Anita dan Koestoer, Raldi. 2007. “Dampak Investasi Terhadap Ketimpangan Kesempatan Kerja Regional di Indonesia.” *Jurnal Kependudukan*, 2 (1), Juni.